

SKRIPSI

**POSISI PEREMPUAN PADA JABATAN PUBLIK DI PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA SULAWESI TENGGARA**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin



OLEH:

ADINDA ARDHIA CAHYANI

E041191036

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

POSISI PEREMPUAN PADA JABATAN PUBLIK DI PEMERINTAH

KABUPATEN KONAWE UTARA SULAWESI TENGGARA

Yang Diajukan Oleh :

ADINDA ARDHIA CAHYANI

E041191036

Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal 2 Februari 2024
Menyetujui:

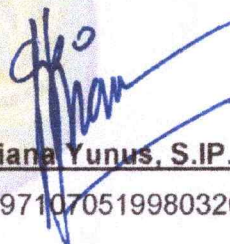
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

NIP. 197109171997031001




Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.

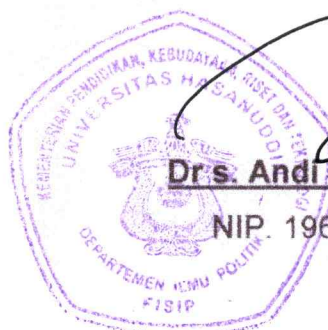
NIP. 197107051998032002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Dr. s. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231199003102



HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**POSISI PEREMPUAN PADA JABATAN PUBLIK DI PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA SULAWESI TENGGARA**

Disusun dan Diajukan Oleh :

ADINDA ARDHIA CAHYANI

E041191036

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi pada

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si. (.....)

Sekretaris : Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si. (.....)

Anggota : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.Si. (.....)

Anggota : Dian Ekawaty, S.IP., MA. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Ardhia Cahyani

NIM : E041191036

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Posisi Perempuan pada Jabatan Publik di Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Januari 2024



ADINDA ARDHIA CAHYANI

ABSTRAK

Adinda Ardhia Cahyani. NIM E041191036. Posisi Perempuan pada Jabatan Publik di Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara. Di bimbing oleh Muhammad dan Ariana Yunus.

Untuk melihat keterlibatan perempuan pada ranah birokrasi sebagai pejabat eselon dua di daerah dan bagaimana upaya yang dilakukan perempuan dalam mendapatkan posisi jabatan di Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara, juga untuk melihat bagaimana pengaruh unsur politik dalam mendapatkan jabatan tersebut. Tipe penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif, untuk mendeskripsikan Posisi Perempuan pada Jabatan Publik di Kabupaten Konawe Utara. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara terhadap beberapa informan, observasi partisipasi dilakukan oleh penulis dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, serta dokumentasi lapangan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan yang menduduki jabatan di birokrasi pemerintahan Kabupaten Konawe utara memang mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tetapi juga masih adanya pengaruh kekuasaan dalam mendapatkan jabatan tersebut yaitu adanya pengaruh dari relasi kekerabatan dalam mendapatkan jabatan tersebut.

Kata Kunci: Perempuan, Birokrasi, Kesetaraan Gender, Relasi Kuasa

ABSTRACK

Adinda Ardhia Cahyani. NIM E041191036. The Position of Women in Public Office in the North Konawe Regency Government, Southeast Sulawesi. Supervised by Muhammad and Ariana Yunus.

To see the involvement of women in the bureaucratic realm as regional officials and the efforts made by women in obtaining positions in the North Konawe Regency Government, as well as to see the influence of political elements in obtaining these positions. This type of research uses descriptive analysis methods.

The research method used is qualitative by using descriptive analysis methods, to describe the position of women in public office in North Konawe Regency. The data collection techniques used were interviews with several informants, participant observation carried out by the writer by going directly to the research location, as well as documentation in the field.

The results of this research show that women who occupy positions in the government bureaucracy of North Konawe Regency do follow existing procedures in accordance with the rules that have been set, but there is still the influence of power in obtaining these positions, namely the influence of kinship relations in obtaining these positions.

Keywords: Women, Bureaucracy, Gender Equality, Power Relations

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Posisi Perempuan pada Jabatan Publik di Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara”**. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.)

Skripsi ini penulis persembahkan pertama-tama kepada dua orang yang sangat berjasa didalam hidup penulis yaitu kedua orang tua penulis, Bapak **Agus Mas’ad Arifin Lamarundu** dan Ibu **Yanti Madjid**, yang menjadi orang tua yang sangat baik dan selalu sabar dalam mendidik dan memberikan motivasi, nasehat, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa dibalas oleh penulis. Semoga Allah SWT yang langsung membalas semua pergobanan Bapak dan Ibu.

Terimakasih kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing **Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.** dan Ibu **Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.** yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dari awal proposal hingga ujian akhir.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof.Dr.Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**, sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu **Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.**, beserta segenap jajaran staf akademik, ada Pak **Sutamin**, Ibu **Irma**, dan Pak **Herman**.

4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak **Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si.**, beserta segenap jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak **Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si.** beserta segenap jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak **Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.**, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik: Bapak **Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.**, Bapak **Alm. Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag.**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, M.A.**, Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.**, Ibu **Dr. Ariana, S.IP., M.Si.**, Ibu **Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.**, Bapak **Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.**, Ibu **Endang Sari, S.IP., M.Si.**, Bapak **Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.**, Ibu **Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.**, Bapak **Zulhajar, S.IP., M.A.**, dan Ibu **Dian Ekawaty, S.IP., M.A.**, yang telah mendukung dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak **Syamsuddin, S.T.**, dan Ibu **Musriati S.E.**, yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.
9. *My one and only sister* **Anggi Pramesti** yang mendukung penulis moril dan materil dengan sangat tulus hingga penulis mendapatkan gelar.

10. Terima kasih buat Sahabatku **Azzahra Purnama Lestari, Adiva Resqita Maidina, Indah Risky Syahrani, Cici Rindiani**, yang telah menjadi sosok yang sangat bermanfaat dalam proses bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi dan juga dalam kehidupan perkuliahan penulis. Semoga sukses buat karir, cita-cita dan juga mimpi-mimpinya.
11. Terima kasih untuk keluargaku besarku terutama **Almarhum Opa** dan **Oma** yang banyak memberikan dukungan moril dan materil di masa perkuliahan penulis. Terima kasih juga buat sepupu-sepupuku, **Triska, Nadya, Mba Puput, Mba Wulan** yang selalu memberikan kekuatan untuk penulis dalam melalui masa-masa sulit. Juga terima kasih untuk saudara-saudari dari Bapak, **Bapak Triska, Tante Wiwi, Almarhumah Tante Titi, Tante Cece, Tante Vivi, Tante Wina, Tante Eka, Tante Ang, Tante Ina** yang selalu banyak memberikan dukungan dan selalu memotivasi penulis untuk menjadi pribadi lebih baik. Terima kasih untuk kebersamaannya selama di Makassar. Saudara-saudari dari Ibu, **Om Jun, Ibu Puput, Bapak Puput, Mama Siska**, terima kasih untuk dukungan selama ini. Juga keluargaku yang lainnya yang tidak dapat saya sebut satu per satu terima kasih telah banyak mendukung dan membantu hingga penulis mendapatkan gelar. Yang telah menjadi sosok yang sangat bermanfaat dalam kehidupan perkuliahan penulis. Semoga sukses kedepannya.

12. Terima Kasih juga untuk orang-orang menjadi bagian perjalanan penulis untuk bertumbuh **Lisa, Imel, Yuli, Widya, Diana, Destry**. Terima kasih untuk selalu menginspirasi penulis.
13. Teman-teman Kelompok 6 KKNT IPTEKS PANGKEP, **Lani, Indira, Dila, Dela, Pio, Iwan, Agam, Yansen** yang banyak memberikan inspirasi bagi penulis. Terima kasih untuk kebersamaannya selama hampir dua bulan di Pangkep. Semoga teman-teman sukses meraih cita-cita dan mimpi-mimpinya.
14. Teman-teman Diplomasi **Rista, Risda, Shila, Jojo, Ina, Hajra, Wiwi, Jusni, Nadira, Muca, Dhea**, dan juga teman-teman **Politik 2019**. Terima kasih sudah menjadi saudara dan keluarga baru serta menjadi sahabat selama penulis berkuliah di Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Terima kasih sudah mengisi hari-hari perkuliahan dari masa mahasiswa baru sampai saat ini.

Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Birokrasi	11
a. Merit Sistem	12
b. Spoil Sistem	12
2.2 Konsep Gender	13
2.3 Konsep Jabatan Publik	15
2.4 Relasi Kekuasaan	17
2.5 Penelitian Terdahulu	19
2.6 Kerangka Berpikir.....	22

2.7 Skema Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	24
Lokasi Penelitian	25
Jenis dan Sumber Data	25
Teknik Pengumpulan Data.....	26
Informan Penelitian	27
Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM	32
Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
Kepala Dinas di Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara	35
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	38
Upaya perempuan dalam mendapatkan Jabatan di Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara	38
Relasi perempuan dengan pemangku kuasa.....	46
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	56
Kesimpulan.....	56
Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kepala Dinas Perempuan	45
Tabel 3.1 Daftar Informan	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, peran perempuan terus meningkat diberbagai sektor bidang. Baik itu dalam, ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Dengan adanya tuntutan global, perempuan kini mampu berdaya melalui pendidikan. Dengan begitu perempuan mampu menduduki jabatan pada sektor publik khususnya pada ranah pemerintahan. Kita bisa melihat bagaimana pandangan mengenai perempuan yang memiliki peran ganda entah sebagai ibu, istri atau wanita karir. Selama ini perempuan hanya dilihat hanya cocok di sektor domestik saja dan perempuan sering dianggap sebagai makhluk yang lemah dan emosional, tetapi pada dewasa ini banyak sekali yang menyuarakan kemajuan dan pemberdayaan perempuan agar mampu setara dengan kaum laki-laki.

Peran perempuan dalam berbangsa dan bernegara sangatlah penting untuk kemajuan suatu negara, dalam upaya pemberdayaan perempuan kita ikut mendukung perempuan untuk diluar sektor rumah. Dan dalam hal ini pemberdayaan perempuan berarti usaha agar perempuan itu sendiri mampu dengan rasa percaya diri yang ia miliki untuk berperan dan berpartisipasi aktif

dalam membangun kemampuan yang dimilikinya. Citra perempuan masa kini lebih maju daripada sebelumnya hanya diwajibkan untuk patuh suami, mengurus anak dan semata-mata mengurus dapur adalah suatu kewajiban bagi kaum perempuan.

Pada kenyataannya memang tidak mudah bagi perempuan untuk berada di sektor publik, melihat bagaimana budaya patriarki di Indonesia sangat melekat. Laki-laki dan perempuan sangat dikotak-kotakkan atau sangatlah diatur dalam pembagian peran oleh konstruksi sosial yang berkembang pada masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan antara peran perempuan dan laki-laki pada sektor publik.

Sistem patriarki yang mendominasi pada kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan juga ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Disini Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, dan sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk didalamnya institusi pernikahan.

Hal ini pula yang menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan

perlakuan diskriminasi. Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama.

Walaupun zaman terus berkembang dengan banyaknya gerakan kaum feminis menyuarakan dan menegakan hak perempuan tetapi kenyataannya praktik budaya patriaki di Indonesia masih terjadi hingga saat ini, untuk memperkecil kesejangan gender yang masih terjadi pada berbagai sektor kehidupan, maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan untuk masa mendatang maka harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional. Khususnya di daerah untuk menjamin upaya penyelenggaraan pembangunan yang diharapkan.

Instruksi presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 terkait pengarusutamaan gender yang mana tujuan dari pengarusutamaan gender ini adalah agar terlaksananya program dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan ini diharapkan baik perempuan maupun laki-laki bisa berkembang tanpa adanya terkendala oleh jenis kelamin.

Dengan adanya Inpres tersebut diharapkan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan juga hak-haknya sebagai manusia terhadap akses dan manfaat dari usaha pembangunan dan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam penguasaan sumberdaya pembangunan (pengetahuan, informasi, keterampilan).

Saat ini kiprah perempuan dalam peran maupun beberapa posisi strategis dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa dipandang sebelah mata. Di berbagai lingkungan organisasi perempuan terus maju melebarkan kapabilitas yang dimilikinya untuk mampu berdaya saing dengan kaum laki-laki. Bisa kita lihat realitas yang ada sekarang dimana ada banyak pemimpin perempuan yang menduduki posisi strategis baik itu lingkup swasta maupun organisasi pemerintahan.

Pejabat dalam kamus KBBI memiliki arti pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting. Menurut (Miftah Thoha, 2006:60). Jabatan publik adalah jabatan yang diduduki oleh seseorang sebagai pejabat pemerintahan. Jabatan dalam rangka satuan organisasi berfungsi untuk menciptakan, menafsirkan dan memperkuat tata tertib pemerintahan. Pemerintahan berperan menetapkan aturan-aturan berperilaku bagi anggota masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara.

Pada sektor publik proses rekrutmen pejabat tentunya terikat dengan aturan yang diatur dalam kepegawaian (Peraturan Pemerintah, 2003). Yang pada posisi tertentu hanya bisa diisi oleh seseorang dengan pangkat dan golongan tertentu. Sehingga dalam situasi ketiadaan sumber daya yang memenuhi pangkat dan golongan, pejabat daerah dihadapkan pada posisi sulit karena harus memilih pejabat yang kapasitas kinerjanya belum teruji, namun karena pangkat dan golongannya sudah memenuhi syarat maka harus dipilih.

Dan pada peraturan terkait jabatan struktural yang diemban seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang tercantum pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2002 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil yang diberikan jabatan telah melaksanakan tugas belajar yang juga dalam kenaikan pangkat tersebut ada unsur penilaian prestasi kerja yang dimiliki seorang pegawai dalam menduduki suatu jabatan tertentu.

Sesuai dengan tujuan dari adanya reformasi birokrasi sendiri untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) juga mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdidikasi, dan memegang teguh nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dan salah satu tugas pokok dari birokrasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah untuk mengimplementasikan penyelenggaraan kegiatan negara melaksanakan

hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara. Juga dijelaskan dalam UU No.5 tahun 2014 tersebut terkait dengan Sistem Merit yang merupakan tentang kebijakan dan manajemen dari aparatur sipil negara (ASN).

ASN bisa dilihat berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit merupakan salah satu hasil dari agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden untuk membangun birokrasi netral dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik.

Perempuan yang menduduki jabatan sebagai kepala dinas di Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara berjumlah empat orang yang mana selebihnya mayoritas kepala dinasnya adalah laki-laki. Menurut informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Konawe Utara masih kurangnya pengalaman yang mumpuni yang menyebabkan masih sedikitnya perempuan yang menduduki jabatan sebagai kepala dinas.

Perempuan yang menduduki Jabatan struktural di Birokrasi Kabupaten Konawe Utara memiliki latar belakang Pendidikan yang baik dan juga sudah memenuhi syarat pada pangkat dan golongan untuk menduduki jabatan sebagai kepala dinas. Dan walaupun prosedur pengangkatan mereka sebagai pejabat eselon II sesuai prosedur yang ada, tetapi tidak bisa di

pungkiri memang masih ada unsur politik dalam mendapatkan jabatan tersebut yang mana ada hubungan kedekatan dengan aktor politik.

Peneliti juga ingin melihat bagaimana perempuan menduduki jabatan eselon dua sebagai kepala dinas tersebut, keterkaitannya dengan elit politik. Kita tahu bagaimana pengaruh kekuasaan pada birokrasi tidak bisa dipisahkan, maka ini berhubungan dengan rekrutmen pejabat struktural di Pemkab. Konawe Utara masih ada kaitannya dengan intervensi politik dan juga kekuasaan didalamnya, padahal sudah jelas ada aturan yang mengatur terkait bagaimana pemilihan pejabat pada organisasi pemerintah.

Dalam upaya mewujudkan kompetensi yang berdaya saing untuk aparatur sipil negara (ASN) harusnya untuk pengembangan dan juga pembinaan ASN bisa berpedoman pada sistem merit yang mana sistem merit ini melihat kemampuan kita dari basis kompetensi yang kita miliki juga diharapkan agar undang-undang yang telah mengatur tentang jabatan dan juga kepangkatan aparatur sipil negara (ASN) berjalan sesuai semestinya.

Tabel 1.1 Jumlah Pejabat Perempuan dan Laki-laki Periode tahun 2022-2023

NO	NAMA OPD	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	1	
2.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	
3.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	
4.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	
5.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	
6.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	
7.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	
8.	DINAS KESEHATAN		1
9.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	
10.	DINAS SOSIAL	1	
11.	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1	
12.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		1
13.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	
14.	DINAS KETAHANAN PANGAN	1	
15.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	
16.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	
18.	DINAS PERHUBUNGAN	1	
19.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	
20.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		1
21.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1	
22.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	1	
23.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	
24.	DINAS PERPUSTAKAAN	1	
25.	DINAS PERIKANAN	1	
26.	DINAS PARIWISATA	1	
27.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	1	
28.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1	
29.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	
30.	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA		1
31.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	
32.	SEKRETARIAT DPRD	1	
33.	INSPEKTORAT DAERAH	1	
	JUMLAH	29	4

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Konawe Utara diakses pada tanggal 10 Mei 2023

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana **“Posisi Perempuan pada Jabatan Publik di Pemerintah Kabupaten Konawe Utara”** Dalam penelitian ini peneliti juga ingin melihat bagaimana pengaruh relasi kuasa bagi perempuan menduduki jabatan sebagai kepala dinas tersebut dengan para pemangku kekuasaan (elit politik lokal).

Kita tahu bagaimana pengaruh kekuasaan pada birokrasi tidak bisa dipisahkan, maka ini berhubungan dengan rekrutmen pejabat struktural di Pemkab. konawe utara masih ada kaitannya dengan unsur politik dan juga kekuasaan didalamnya, padahal sudah jelas ada aturan yang mengatur terkait bagaimana pemilihan pejabat pada organisasi pemerintah.

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat apa yang dilakukan perempuan dalam menduduki jabatan struktural yang bersangkutan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya perempuan dalam mendapatkan posisi jabatan di Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan perempuan dalam mendapatkan posisi jabatan di Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Akademik

Untuk memperkaya intelektual para pembaca peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat berguna untuk bidang ilmu politik dalam melihat peran perempuan di sektor publik, serta penulis berharap penelitian ini dapat menambah literatur untuk penelitian atau kajian selanjutnya pada bidang ilmu politik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi acuan bagi peneliti dan bagi pembaca untuk dapat menambah wawasan penulis dalam membaca dan menulis. Juga diharapkan bagi para pembaca, harapannya penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak juga dapat memperkaya pengetahuan para pembaca tentang probematika yang sedang dihadapi perempuan dalam beberapa bidang pekerjaan.

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

2.1 Birokrasi

Menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi dalam sebuah negara bisa dikatakan sebagai *machine of change*. Birokrasi mempunyai peran penting dalam struktur pemerintahan, karena birokrasilah yang akan melaksanakan keputusan politik dan kebijakan yang dibuat oleh *policy maker* atau dengan kata lain birokrasi adalah bagian sistem *problem solver*. Melihat pentingnya struktur dan peran birokrasi, maka birokrasi semestinya diisi oleh orang-orang yang kompeten dan professional.

Birokrasi diartikan sebagai sebuah organisasi yang mempunyai hierarki, rantai komando, *job specialization* dan melaksanakan tugas pemerintah serta melaksanakan kebijakan untuk kepentingan publik (Weber, 1978); (Hague, Harrop & Breslin, 1998). Pada birokrasi pemerintahan dalam menempatkan pejabat daerah di jabatan publik sering kita jumpai dengan merit system dan juga spoil system.¹

¹ Birokrasi Adalah Suatu Sistem Organisasi, Pahami Pengertian dan Perannya. <https://www.liputan6.com/hot/read/4971621/birokrasi-adalah-suatu-sistem-organisasi-pahami-pengertian-dan-perannya> . 9 agustus 2023.

a. Merit System

Sistem ini merupakan pengangkatan pegawai berdasarkan pada kualitas, kompetensi yang dimiliki seorang pegawai. Tetapi disamping itu pegawai juga perlu diberikan pelatihan agar produktivitas pekerjaan dapat meningkat dan efisiensi pekerjaan tercapai. System merit merupakan salah satu hasil dari agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden untuk membangun birokrasi netral dan mampu memberikan pelayanan publik serta terbebas dari KKN. Yang tujuan diberlakukannya system merit dalam manajemen kepegawaian adalah untuk menghasilkan ASN yang professional dan berintegritas dengan menempatkannya pada jabatan-jabatan yang sesuai kompetensinya, pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kemampuan ASN melalui Pendidikan dan pelatihan, dan melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit.

b. Spoil System

Spoil system adalah sistem yang ada dipemerintahan yang berhubungan dengan koneksi politik atau kepentingan suatu individu dan juga kelompok tertentu saja. ini dilakukan sebagai salah satu bentuk balas budi bagi Sebagian orang yang menduduki jabatan. Jika jabatan tersebut dimenangkan, bagi para pendukung pemenang akan diberikan hadiah sebagai hasil bantuan yang telah dilakukan. Pada dasarnya spoil system diisi

oleh kedekatan politik sehingga menimbulkan politisasi birokrasi. Karena dalam sistem ini, pengangkatan pegawai kurang memperhatikan faktor kompetensi yang menjadi hal penting bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan.

2.2 Konsep Gender

Kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ciri dari sifat itu sendiri dapat dipertukarkan, dapat berubah dari waktu ke waktu, serta berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Terbentuknya perbedaan gender melalui proses yang sangat panjang, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksi secara sosio-kultural bahkan melalui ajaran keagamaan maupun negara (Fakih,1999:5).

Selama ini kita tahu bahwa pembangunan pada perempuan masih ada ketimpangan, maka dari itu untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan menghilangkan faktor kendala yang dihadapi perempuan dalam pembangunan.

Pendekatan dengan *Women In Deveploment* (WID) didasarkan pada teori modernisasi dan feminis liberal yang bertujuan untuk mengintegrasikan perempuan dalam proses pembangunan. Perspektif WID ini berlanjut eksistensi seiring dengan paradigma modernisasi, dimana negara ²

Berkembang mengadopsi teknologi, kelembagaan dan nilai-nilai barat. Perspektif WID menekankan persamaan kesempatan pada perempuan. Untuk membentuk keberadaan wanita dalam proses pembangunan, Kebijakan berorientasi wanita diperlukan dengan ambisi untuk meningkatkan efisiensi dan kemajuan pembangunan ekonomi. Dalam pendekatan WID lebih menekankan posisi produktif dalam tenaga kerja wanita.

Dalam analisis gender ini hadir sebagai alat analisis sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh keyakinan gender yang mengakar dan tersembunyi di berbagai tempat terutama pada tradisi masyarakat, keyakinan keagamaan, serta kebijakan dan perencanaan pembangunan. Juga analisis gender membantu untuk memahami bagaimana suatu sistem dan struktur tidak adil antara kaum perempuan dan laki-laki.

² Nur Aisyah, Relasil Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis) 206, Jurnal Muwazah Kajian Gender, Vol. 5 No. 2, 24 Maret 2014.

Atas dasar itulah suatu pendekatan baru *gender and development* muncul sebagai suatu pendekatan yang sepenuhnya menggunakan analisis gender bahwa perempuan juga yang sangat berpengaruh dalam kebijakan pembangunan, yakni bias gender dalam pembangunan. Perempuan juga sebagai agent dari perubahan sosial yang patut diperhitungkan posisinya disektor publik khususnya di birokrasi pemerintah daerah.

2.3 Jabatan Publik

Sesuai dengan peraturan Pemerintah RI Nomor. 13 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa jabatan ialah sebuah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Garry Desser (1998:85) jabatan adalah prosedur untuk menentukan tugas-tugas dan hakikat pekerjaan serta jenis orang (berkaitan dengan keterampilan dan pengalaman) yang perlu untuk dilaksanakannya. Sedangkan menurut Nurmansyah (2000:29) jabatan adalah tahap pertama dalam penyusunan organisasi, dengan adanya pembagian kerja dalam organisasi yang menciptakan banyak pekerjaan.

Jabatan dalam rangka satuan organisasi berfungsi untuk menciptakan, menafsirkan dan memperkuat tata tertib yang mengingat anggota-anggota dalam sistem politik disebut dengan jabatan. Kumpulan jabatan dalam suatu sistem politik membentuk pemerintahan dari sistem itu, pemerintahan berperan menetapkan aturan-aturan berperilaku bagi anggota masyarakat

yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara. Jabatan publik adalah jabatan yang diduduki seseorang sebagai pejabat pemerintahan.

Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu dalam birokrasi pernerintah. Kekuasaan pejabat ini amat menentukan, karena segala urusan yang berhubungan dengan jabatan itu maka orang yang berada dalam jabatan itulah yang akan menentukan. Jabatan-jabatan tersebut disusun dalam tatanan hierarki dari atas ke bawah. Jabatan yang berada di hierarki atas memiliki kekuasaan yang lebih besar dari jabatan yang berada di tataran bawah. Jabatan struktural merupakan suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara (ASN). Eselon adalah tingkat jabatan struktural, ada eselon tertinggi sampai terendah seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah NO 13 Tahun 2002. Dan untuk dapat diangkat dalam suatu jabatan struktural maka seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut;

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- b. Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan.

- d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang ditentukan.
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pada penelitian ini jabatan publik adalah seorang birokrat di pemerintah daerah yang mana seorang individu berada dalam suatu tugas, tanggung jawab dan juga wewenang sebagai aparatur sipil negara dalam rangka menjalankan tujuan dan fungsi birokrasi sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya agar terciptanya tujuan organisasi dengan baik.

2.4 Relasi Kekuasaan

Relasi kuasa merupakan hubungan yang terbentuk antar aktor-aktor tertentu yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Dalam relasi kuasa terdapat ada unsur kekuatan hubungan sosial yang mana seorang aktor mempunyai kemampuan untuk mengubah perilaku aktor yang lainnya, dalam hal ini unsur kekuasaan memiliki pengaruh dalam membentuk sebuah program atau kegiatan sesuai dengan kepentingan seseorang, bahkan terhadap perlawanan aktor-aktor lain. Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault merupakan suatu dimensi dan relasi, yang mana disana ada relasi disana pula ada kekuasaan. Foucault mengakui bahwa ada sekian banyak kekuatan dan kuasa yang menyebar luas dalam relasi antar manusia. Kekuatan-kekuatan ini ditemukan dalam berbagai aspek relasi antar

manusia, misalnya relasi antar manusia dengan manusia lain dan juga relasi manusia dengan lingkungan dan situasi mereka, dan lain-lain.

Isu Relasi kuasa senantiasa mendasari setiap proses politik dalam tingkat individu ataupun kelompok. Relasi kuasa merupakan esensi dari berpolitik. Kekuasaan bukanlah milik tetapi melainkan sebuah strategi, kekuasaan berkaitan dengan strategi praktek dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Kekuasaan bekerja melalui strategi-strategi yang berlangsung dimanapun, kekuasaan semakin terealisasi melalui adanya³ perbedaan-perbedaan, ada banyak sistem regulasi, adanya relasi sosial manusia sesama maupun dengan lembaga.

Relasi kuasa merupakan konsep hubungan kekuasaan yaitu praktik-praktik kekuasaan dari subyek pada obyek melalui berbagai media dan rupa kekuasaan yang dimaksudkan tidak didapat dari cara-cara yang represif, melainkan secara manipulatif dan hegemonik. Juga Foucault (2007) mendefinisikan Kekuasaan adalah soal praktik-praktik konkrit yang lantas menciptakan realitas dan pola-pola perilaku, memproduksi wilayah objek-objek pengetahuan dan ritual-ritual kebenaran yang khas

³ 8 Bab II Kajian Teoritis A. Relasi Kuasa.hal 8-9
<http://repositori.unsil.ac.id/3195/11/11.%20BAB%202.pdf>

Namun yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian tentang Kekuasaan menurut Foucault sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Yang pada umumnya, kekuasaan dipahami sebagai adanya daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Pada konteks ini kekuasaan diartikan secara represif dan kadangkala malah opresif. Yakni adanya dominasi antara subjek dan objek kekuasaan. Misalnya seperti kekuasaan negara pada masyarakat, raja pada rakyatnya, atau suami pada isteri, juga pemilik modal kepada para karyawannya.

Analisis yang dikenal sebagai *discourse analysis* adalah hasil pemikiran Foucault terhadap teori perubahan sosial yang memungkinkan teori tersebut membongkar relasi kekuasaan dan dominasi pada suatu konsep atau wacana pembangunan karena konsepsi dan wacana pembangunan memang tidak pernah netral, objektif dan bebas nilai

2.5 Peneletian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Yani Chaniago dalam skripsi yang berjudul Relasi Perempuan dan Jabatan Publik di Pemerintah Kota Subulussalam, pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perempuan yang menduduki jabatan Posisi strategis yang didapatkan oleh perempuan dalam ranah eksekutif di Kota Subulussalam sudah sangat terlihat jelas, para perempuan sudah sangat berperan aktif dalam

mendapatkan jabatan publik di ranah pemerintahan eksekutif Kota Subulussalam serta sudah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal tersebut menjadi nilai positif yang memperlihatkan bahwa perempuan sejatinya memiliki profesionalisme dalam bekerja dan bisa bertanggung jawab didalam pekerjaan tersebut. Tetapi disamping itu juga perempuan yang memiliki jabatan di kota subulussalam memiliki ikatan kekerabatan dengan aktor politik atau kepala daerah di Pemerintah Kota Subulussalam yang mana ini mempengaruhi posisi jabatan yang ditempati oleh perempuan disana.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Leny Nofianti pada tahun 2016 dalam jurnal yang berjudul Perempuan dalam sektor Publik. Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas kinerja paling tinggi terdapat pada SKPD yang dikepalai oleh seorang perempuan. Akuntabilitas kinerja tersebut diukur dengan menggunakan indikator dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja SKPD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Propinsi Riau. Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja yang meliputi pencapaian sasaran organisasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmah H. dalam skripsi berjudul Peranan Perempuan Dalam Jabatan Publik di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dapat memenuhi hak-hak kepada pegawai seperti dalam menyampaikan masalah yang dihadapi, dan dapat melibatkan pegawai dalam suatu hal juga dapat memberikan fasilitas kepada pegawai untuk mendukung pekerjaan mereka. Dalam hal ini juga perempuan juga mampu menjadi pendengar yang baik dan sebagai motivator baik itu dalam menyerap aspirasi dari pegawai maupun staf dan juga bisa menciptakan sebuah lingkungan kerja yang kondusif untuk dirinya dan pegawainya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti N. Batjo dan Nuraeni dalam pada tahun 2022 dalam jurnal yang berjudul, Peran Kepemimpinan Perempuan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku (Studi Pada Subag Ortala & Kub). Pada hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal: Pertama, adanya pembinaan pada peran kepemimpinan perempuan dalam hal pembinaan yang sudah dilakukan dengan baik, Pemimpin membina bawahan dengan terlebih dahulu menjaga sikap mereka sebagai pimpinan, menjadi contoh yang baik dalam hal kedisiplinan, dan ketauladanan. Selalu bersikap positif, serta terlibat dalam tugas dan pekerjaan agar pada saat memberikan pembinaan para pegawai dapat menerima dengan baik. Kedua motivasi,

motivasi mempengaruhi gaya kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, kepemimpinan dapat pula berarti kemampuan memberi motivasi kepada bawahan. Dalam menjalankan kepemimpinan yang dilakukan pada bagian sub Ortala dan KUB ini memperlihatkan bahwa pimpinan sangat aktif dalam jabatannya, dan mampu menjalankan tugas dengan baik serta sikap dan kepribadian terlihat sebagai pemimpin yang pekerja keras, berwibawa dan bertanggung jawab yang tidak kalah performanya dengan laki-laki. Ketiga pengawasan, pengawasan bertujuan agar terwujudkan efektivitas dan efisiensi kerja Dalam mengawasi pekerjaan bawahan, pemimpin perempuan selalu melakukan kontrol kerja disaat bawahan sedang bekerja dan mengawasi kinerja para bawahan, serta selalumemberikan penilaian-penilaian kerja bawahan, membantu pekerjaan bawahandan selalu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Lalu yang terakhir ada pengambilan keputusan, salah satu tugas terpenting seorang pemimpin adalah untuk menentukan yang terbaik bagi organisasi dan para anggotanya. Kecepatan dan ketepatan seorang pemimpin perempuan dalam mengambil keputusan lazimnya menjadi tolak ukur kompetensi dan kredibilitas yang dimiliki. Terbiasa cepat dalam pengambilan keputusan memang bukan pekerjaan mudah, butuh rasio yang jernih dan intuisi yang tajam agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat.

2.6 Kerangka Berpikir

Pada Penelitian ini dilakukan di Birokrasi Kabupaten Konawe utara. Juga dalam mendukung ASN Perempuan yang menduduki jabatan struktural di birokrasi pemerintahan Kabupaten Konawe Utara tentunya tidak hanya saja dilihat dari *background* latar belakang Pendidikan ataupun pengalaman kerjanya, tetapi ada faktor hubungan kekuasaan, atau isu relasi kuasa senantiasa mendasari setiap proses politik dalam tingkat individu ataupun kelompok. Relasi kuasa merupakan esensi dari berpolitik dan elasi Kekuasaan yang dimaksud disini adalah bagaimana hubungan kekerabatan mempengaruhi terpilih seseorang pada jabatan struktural pada eselon dua di birokrasi di Pemkab. Konawe Utara.

2.7 Skema Pemikiran

